ANIMO MASYARAKAT MANTAN PESERTA *LAND MANAGEMENT AND POLICY DEVOLEPMENT PROJECT* DALAM KEGIATAN *ACCESS REFORM* DAN TINGKAT KESEJAHTERAANNYA

(Studi di Desa Panjangrejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk
Memperoleh Sebutan Sarjana Sains Terapan
Pada Program Diploma IV Pertanahan
Jurusan Manajemen Pertanahan

Oleh :

TAUFIQUL FAJRI AL MUTAMIMUL ULA

NIM 10192545

PROGRAM DIPLOMA IV PERTANAHAN

SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

YOGYAKARTA

2014

kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat diterima dan disetujui.

Yogyakarta, Agustus 2014.

Taufiqul Fajri Al Mutamimul Ula

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
LEMBAR PENGESAHAN ii
PERNYATAAN KEASLIAN iii
MOTTO iv
HALAMAN PERSEMBAHAN v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR LAMPIRAN xii
INTISARI xiii
ABSTRACT xiv

BAB I. PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang 1
- B. Rumusan Masalah 5
- C. Tujuan Penelitian 6
- D. Manfaat Penelitian 6
- E. Kebaruan Penelitian (*Novelty*) 7

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA & KERANGKA PEMIKIRAN
- A.Tinjauan Pustaka 12
  1. Animo Masyarakat 12
  2. Pengertian LMPDP 13
  3. Tujuan LMPDP 15
  4. LMPDP di Desa Panjangrejo 16
  5. Ukuran Kesejahteraan 17
  6. Pengembangan Akses Reform 20
  7. Modal Usaha dan Skala Usaha 24
  8. Teori Pendapatan 27
- B. Kerangka Pemikiran 30
- C. Hipotesis Penelitian 32

BAB III. METODE PENELITIAN
- A. Format Penelitian 33
- B. Lokasi Penelitian 33
- C. Populasi dan Sampel 34
- D. Variabel dan Definisi Oprasionalnya 35
- E. Jenis-jenis Sumber Data 38
- F. Tehnik Pengumpulan Data 39
- G. Tehnik Analisis Data 40

BAB IV GAMBARAN UMUM DAN KARAKTERISTIK RESPONDEN
A. Gambaran Umun 42
1. Aspek Historis Lokasi Penelitian..... 42
2. Kondisi Geografis dan Astronomis Penelitian..... 42
3. Keadaan Demografi Lokasi Penelitian 44
4. Keadaan Sosial Masyarakat 47
B. Karakteristik Responden 52

BAB V. ANIMO DAN ALASAN MASYARAKAT DALAM MENGGUNAKAN SERTIPIKAT PRODUK LMPDP SEBAGAI JAMINAN PINJAMAN MODAL USAHA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN
A. Animo dan Alasan masyarakat 58
1. Animo masyarakat 58
2. Alasan Masyarakat..... 59
B. Kecenderungan Hubungan Antara Karakteristik Masyarakat Mantan Peserta LMPDP Dengan Besar Modal dan Kesejahteraan 66
1. Kecenderungan Hubungan Antara Karakteristik Masyarakat Mantan LMPDP dalam Mengambil Besar Agunan 66
2. Kecenderungan Hubungan Antara Karakteristik Masyarakat Mantan LMPDP dengan Keuntungan dan Kesejahteraan 75
3. Kecenderungan Hubungan Antara Pendidikan Terhadap Pekerjaan dan Usahanya 84
C. Kecenderungan Besar Agunan Terhadap Kesejahteraan 86

BAB VI KESIMPULAN
A. Kesimpulan 89
B. Saran..... 90

DAFTAR PUSTAKA..... 91
LAMPIRAN..... 94

ABSTRACT

The aids obtained from World Bank could be used by The National Land Agency (BPN) to do the land administration project . The implementation of the project consists of two steps. The frst step was implemented during 1994-2001. The project was called *Indonesian Land Administration Project* (ILAP). The scond step was carried out during 2004-2009. The activity was called *Land Management and Policy Devolepment Project* (LMPDP). The second project resulted positive impact to the society. The land certificates could be used as guarantee to get business capital to improve the societies' welfares. The research is aimed at (a) knowing the motivation and reason of the ex-LMPDP participants in using their certificates as guarantee, (b) knowing the amount of capital according to the respondents' characteristics, (c) knowing the amount of income of LMPDP participants related to their capital.

The method used was the survey method. The population was the people receiving land certificates through IMPDP project. The number of samples was obtained from 16 respondents using land certificates as guarantees and 8 respondents who did not use certificates as guarantees. The samples were obtained from 2 sub villages from 10 sub villages used as the project locations at Panjangrejo Village, Pundong Sub district, Bantul Regency in 2007.

The result showed that the motivation of the societies holding certificates of LMPDP project obtained the business capital of 58,3 %. The factors affecting the amount of loans were types of jobs and business. The factors affecting the income and the welfare level were age and types of business.

Key words : LMPDP, capital, income, welfare

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) memulai Proyek Administrasi Pertanahan atau *Indonesian Land Administration Project (ILAP)* pada tahun 1994-2001 dengan dukungan pembiayaan dari AusAID dan Bank Dunia[1]. Program tersebut kemudian dilanjutkan kembali antara tahun 2004-2009 dengan *Land Management and Policy Devolepment Project (LMPDP)* yang difokuskan kepada penguatan kelembagaan dan pensertipikatan tanah[2]

BPN-RI secara konsisten ingin melanjutkan program percepatan pendaftaran tanah sistematik. Salah satu kegiatan lanjutan dari percepatan pendaftaran tanah sistematik tersebut menggunaan sumber pendanaan dari Bank Dunia, yakni LMPDP atau Proyek Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Pertanahan. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2005 tentang Petunjuk Pencairan Dana Loan IBRD No. 473113884-IND LMPDP Pasal 1 ayat (1) yakni[3]: "*Land Management and Policy Devolepment Project"* yang selanjutnya disebut LMPDP adalah kegiatan dalam rangka melakukan proses sertipikasi tanah melalui pendaftaran tanah

[1] Seminar mengenai ketersedian petugas ukur pada kantor pertanahan yang diselengarakan di kanwil BPN-RI Provinsi Bali, kota Denpasar, Bali. Pada tangal 1 Agustus 2013

[2] Seminar mengenai ketersedian petugas ukur pada kantor pertanahan yang diselengarakan di kanwil BPN-RI Provinsi Bali, kota Denpasar, Bali. Pada tangal 1 Agustus 2013

[3] Dedi Sumartono, *Studi Pelaksanaan Land Management and Policy Devolepment Program di Kabupaten Bantul Tahun 2005*, hal 31

bagi masyarakat, untuk mendukung program pemerintah di bidang manajemen pertanahan yang sebagian kegiatannya dibiayai dari dana pinjaman Bank Dunia"

Pelaksanaan proyek LMPDP dirasakan memang telah dapat memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kegiatan pendaftaran tanah di Indonesia. Percepatan pendaftaran tanah melalui proyek LMPDP mempunyai jangkauan, meliputi *Project Land Policy* (kebijakan pertanahan), *Land Registration* (pendaftaran tanah), dan *Land Management* (manajemen pertanahan). Pelaksanaan LMPDP melibatkan 3 instansi pemerintah, yakni BPN-RI, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Departemen Dalam Negri (Depdagri). Dilibatkannya ketiga instansi Negara besar tersebut secara tersirat menggambarkan bahwa LMPDP merupakan suatu pekerjaan besar baik dari segi tenaga maupun anggaran yang harus disediakan.

Sebagai salah satu program kegiatan besar, tidak mustahil jika program ini telah menciptakan dampak positif (*positive multiplier effects*) yang besar pula, yaitu berupa tumbuhnya kesadaran masyarakat pemilik tanah untuk segera memohon penerbitan sertipikat melalui kegiatan pendaftaran tanah sistematik swadaya dan adanya partisipasi Pemerintah Daerah untuk meluncurkan proyek Ajudikasi Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) setelah ILAP Phase I berakhir.

Secara lebih pragmatis, program LMPDP juga dirasakan sangat penting bagi masyarakat, oleh karena melalui program ini dapat dibangun pengertian dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya batas-batas bidang

tanah. Hal ini ditunjukkan oleh sikap masyarakat sebelum adanya pengukuran LMPDP yang sangat acuh atas pentingnya batas-batas bidang tanah, tetapi setelah dilakukannya pengukuran bidang-bidang tanah melalui program LMPDP ternyata mampu membangun pengertian dan kesadaran masyarakat untuk peduli dengan batas-batas bidang tanah mereka.

Pengukuran LMPDP dilakukan terhadap seluruh bidang tanah di wilayah yang telah ditetapkan, yaitu meliputi tanah yang belum bersertipikat maupun tanah yang sudah bersertipikat, sehingga LMPDP menghasilkan peta pendaftaran tanah yang utuh dan menyeluruh di wilayah yang telah ditetapkan tersebut. Kondisi ini menyebabkan bahwa di wilayah yang menjadi target pengukuran akhirnya memiliki peta pendaftaran tanah yang utuh. Manfaat positif yang dirasakan dari kondisi tersebut adalah bahwa masyarakat menjadi dapat mengetahui luas tanah yang dimiliki, letak tanah, dan bentuk tanah yang sebenarnya.

Tidak hanya seperti yang telah disebutkan di atas, masyarakat juga menerima sertipikat hak atas tanah sebagai tanda bukti kepemilikan atas tanah yang mereka miliki secara sah. Sertipikat ini menjamin, bahwa siapapun dan pihak manapun selain subyek hak namanya tertera dalam sertipikat tersebut secara hukum tidak berhak atas tanah untuk menguasai, menggunakan, dan memiliki terhadap tanah tersebut tanpa ijin subyek hak dimaksud. Kondisi ini menunjukkan bahwa setelah dikeluarkannya sertipikat hak milik atas nama subyek hak bersangkutan, maka subyek hak tersebut dilindungi secara hukum atas kepemilikan tanahnya dan mereka berhak menggunakan tanah mereka

baik (secara fisik) maupun menggunakan sertipikat dimaksud sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah secara *normative* sebagai bukti jaminan untuk mendapatkan pinjaman pendanaan dari berbagai lembaga keuangan, misalnya bank. Hal ini berarti, bahwa pemilik sertipikat diuntungkan untuk berhak menggunakan sertipikat ini sebagai jaminan atas suatu pinjaman sejumlah uang tertentu untuk mendukung permodalan usaha dan kebutuhan lain-lain meereka tanpa menyentuh secara fisik tanah yang bersangkutan. Melalui tambahan permodalan yang didapatkan oleh pemegang sertipikat hasil LMPDP dapat digunakan untuk membuat usaha dan atau memperbesar skala usaha dengan harapan dapat memperoleh tambahan pendapatan. Tambahan pendapatan inilah yang diharapkan mampu meningkatkan kemampuan mereka dalam emmenuhi kebutuhan hidupnya atau kesejahteraannya.

Dalam penelitian ini ingin diketahui bagaimana pemanfaatan sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan melalui LMPDP dimanfaatkan oleh masyarakat pemegang hak atas tanah yang bersangkutan untuk memperoleh batuan permodalan dan bagaimana pengaruh tambahan permodalan tersebut terhadaop peningkatan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Berkaitan dengan maksud ini di Desa Panjangrejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul telah dilaksanakan kegiatan LMPDP yang melakukan percepatan pensertipikatan tanah yang dimaksud. Oleh karena itu, penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Panjangrejo.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Animo Masyarakat Mantan Peserta *Land Management and*

Policy Devolepment Project Dalam Kegiatan *Access Reform* dan Tingkat Kesejahteraannya (Studi di Desa Panjangrejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul) ".

B. Rumusan Masalah

Ada dua hal penting yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas, yaitu (a) melalui kegiatan LMPDP di Desa Panjangrejo. Banyak masyarakat yang mendapatkan sertipikat hak milik atas tanah yang mereka miliki yang menjamin kekuatan sekaligus kepastian hubungan hukum antara tanah sebagai obyek hak dan pemilik sebagai subyek hak dan (b) sertipikat dapat digunakan sebagai alat penjamin bagi masyarakat sebagai pemilik tanahnya dalam mendapatkan pinjaman permodalan untuk membuat atau mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Namun demikian masih ada hal yang perlu dikaji lebih lanjut berkaitan dengan peranan dari sertipikat hasil LMPDP tersebut bagi para masyarakat pemegang sertipikat hak atas tanah dalam upaya peningkatan kesejahteraannya.

Berpangkal tolak pada pemikiran di atas, penulis mengangkat permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana animo dan alasan masyarakat pemegang sertipikat hak atas tanah hasil LMPDP dalam menggunakannya sebagai alat jaminan memperoleh pinjaman modal usaha?
2. Bagaimana kecenderungan besar modal usaha yang diperlukan dan pendapatan peserta LMPDP menurut umur, pendidikan, pekerjaan, jumlah tanggungan, dan usahanya?

3. Bagaimana kecenderungnan besarnya pendapatan peserta LMPDP menurut besarnya modal ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berkaitan dengan rumusan masalah yang terdapat diatas. Maka tujuan penelitian pada propasal ini adalah :

1. Mengetahui animo dan alasan masyarakat pemegang sertipikat tanah hasil LMPDP dalam menggunakannya sebagai alat jaminan memperoleh pinjaman modal usaha.
2. Mengetahui kecenderungan besar modal usaha yang diperlukan dan besar pendapatan peserta LMPDP menurut umur, pendidikan, pekerjaan, jumlah tanggungan, dan usahanya.
3. Mengetahui kecenderungnan besarnya pendapatan peserta LMPDP menurut besarnya modal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

   Secara teoretis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam menentukan langkah-langkah dan kebijakan tentang pemberdayaan mantan peserta program LMPDP. Penelitian ini juga mengingatkan kepada semua pihak yang terkait bahwa pelaksanaan LMPDP tidak berhenti dengan penyerahan sertipikat tanah kepada pesertanya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang manfaat dari pentingnya mensertipikatkan tanah yang dimiliki yaitu selain memberikan kepastian hukum hak atas tanah, sertipikat tersebut juga digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan modal untuk meningkatkan kesejahteraannya. Penelitian ini juga dapat menambah pengetahuan penelitia tentang pelaksanaan LMPDP dan pasca pelaksanaan LMPDP menyangkut kesejahteraan Masayrakat mantan penerima LMPDP.

E. Kebaruan Penelitian (*Novelty*)

Agar penelelitian ini dapat diketahui posisi penelitian terhadap keilmuan yang sudah ada dan dapat mengetahui kebaruan penelitian, maka peneliti mambuat tabel novelty seperti pada tabel 1.

Tabel 1: kebaruan/ novelty

No.	Peneliti dan Tahun penelitian	Judul Penelitian	Hasil penelitian
1	Sujiana, 2007	Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Land Management And Policy Development Program Di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul	1. Faktor biaya pensertipikatan tanah merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam kegiatan LMPDP. 2. Faktor tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, tanggapan biaya pensertipikatan, dan tanggapan prosedur pensertipikatan secara simultan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan LMPDP. 3. Faktor tingkat pendidikan secara parsial tidak berpengaruh nyata.
2	Varida Ariyani Handoyo, 2007	Partisipasi Ajudikasi Land Management And Policy Development Program Di Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul	1. Pelaksanaan LMPDP tahun 2005 berhasil mensertipikatkan sejumlah 4.451 dari 5000 bidang atau 89% 2. Ketidak ikut sertaannya pemiliki bidang tanah karena terjadi sengketa baik fisik maupun yuridis. 3. Pelaksanaan LMPDP berjalan dengan baik, walaupun terdapat berbagai masalah ataupun hambatan tetapai dapat ditangani dengan baik.
3	Sumartiyah,2009	Studi Pelaksanaan Kegiatan Land Management And Policy Development Project (LMPDP) Di Desa Kaliagung, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo	1. Hasil penerbitan sertipikatnya dapat melebihi target yaitu 2.012 bidang dari target 2.000 bidang atau 106,6% 2. Manfaat yang diperoleh dari hasil pensertipikatan tanah melalui program LMPDP dapat dinikmati oleh Kantor Pertanahan Kulon Progo, Pemerintah Desa Kaliagung, dan Masyarakat Desa Kaliagung peserta LMPDP.

Bersambung...

Lanjutan....

4	Dedy Sumartono, 2009	Studi Pelaksanaan Kegiatan Land Management And Policy Development Program Di Kabupaten Bantul Tahun 2005	1. Pelaksanaan LMPDP belum memenuhi target yakni 14.175 dari 15.000 atau 94,5%. 2. Kurang efektifnya kinerja panitia /Tim Ajudikasi di masing-masing lokasi. 3. Kurang berhasilnya pelasanaan LMPDP di Desa Bangunjiwo dan Desa Wijirejo karena kurang keikutsertaannya pemilik tanah dalam kegiatan LMPDP. 4. Keberhasilan pelaksanaan LMPDP di Desa Guwosari karena antusiasme pemilik tanah dalam kegiatan LMPDP
5	I Gede Winarta, 2009	Percepatan Sertipikasi Tanah Melalui Program Land Management And Policy Development Project (LMPDP) Di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi N.T.B. Tahun 2008 (Studi Kasus Di Desa Kediri Dan Desa Montang Are, Kecamatan Kediri)	1. Pelaksanaan LMPDP secara kuantitas telah berhasil menerbitkan 3.000 bidang. 2. Pelaksanaan LMPDP secara kualitas produknya terabaikan karena: a. penyuluhannya tidaksesuai dengan PMNA/KBPN-RI 3 Tahun 1997. b. Kegiatan penunjukan dan penetapan batas dilakukan oleh kepala dusun. c. Terdapat pengukuran bidang tanah yang tidak ada patok batas tanahnya. d. Penyelidikan riwayat tanh belum dilakukan dengan teliti. e. Panitia adjudikasi tidak bisa bekerja secara *full time* di lokasi.

Bersambung...

Lanjutan....

6	Taufiqul Fajri Al Mutamimul Ula, 2014	Pengaruh sertipikasi LMPDP Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Panjangrejo, Keca. Pundong, Kab. Bantul)	1. Animo masyarakat pemegang sertipikat tanah mantan LMPDP dalam mengagunkan sertipikatnya sebagai jaminan memperoleh modal usaha sebesar 58,33%. Hal ini menunjukkan animo masyarakat cukup besar dalam mengagunkan sertipikat 2. Faktor yang mempengaruhi besarnya pinjaman modal usaha yang diambil oleh masyarakat adalah jenis pekerjaan dan jenis usaha. 3. Faktor yang mempengaruhi pendapatan dan tingkat kesejahteraan peserta LMPDP adalah umur dan jenis usaha.

Melihat tabel 1, maka peneliti menyimpulkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang baru. Proyek LMPDP terkenal antara tahun 2007 sampai tahun 2009. Penelitian terdahulu adalah penelitian pelaksanaannya, sedangkan penelitian ini memeliti tentang pengaruhnya terhadap masyarakatnya. Penelitian terdahulu lebih melihat tentang keberhasilan LMPDP dan apa saja yang mempengaruhi keberhasilan LMPDP itu. Sedangkan penelitian ini melihat pengaruhnya setelah pelaksanaan LMPDP ini terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengaruh pelaksanaan suatu proyek terhadap kesejahteraan masyarakat dapat dilihat setelah beberapa tahun setelah pelaksanaannya. LMPDP yang dilaksanakan pada Desa Panjangrejo telah dilaksanakan pada tahun 2007. Peneliti menyimpulkan bahwa ini waktu yang tepat untuk melasanakan penelitian ini.

BAB VI
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Animo masyarakat pemegang sertipikat tanah mantan LMPDP dalam mengagunkan sertipikatnya sebagai jaminan memperoleh modal usaha sebesar 58,33%. Hal ini menunjukkan animo masyarakat cukup besar dalam mengagunkan sertipikat. Alasan masyarakat mengagunkan sertipikat antara lain sebagai alat untuk menambah modal usaha dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Alasan masayakat tidak mengagunkan sertipikatnya antara lain karena sudah bekerja di luar negri, sudah mendapatkan warisan dari orang tua, penghasilan usahanya sudah cukup untuk modal dan ada yang takut tidak dapat mengangsurnya.
2. Berdasarkan kecenderungan mantan peserta LMPDP terhadap besar modal dan besar pendapatan yang diperoleh adalah sebagai berikut:
   a. Mantan peserta LMPDP cenderung berhasil mendapatkan besarnya pinjaman modal berdasarkan jenis pekerjaan dan jenis usaha. Mantan peserta LMPDP yang memiliki pekerjaan sebagai wirausaha cenderung memiliki animo mengambil agunan lebih tinggi dari yang lain, sedangkan mantan peserta LMPDP yang memiliki pekerjaan sebagai buruh mengambil agunan yang terendah. Mantan peserta LMPDP yang memiliki jenis usaha jual beli memiliki kecenderungan

berani mengambil aguanan lebih tinggi daripada usaha lain, sedangkan mantan peserta LMPDP yang memiliki jenis usaha di bidang pertanian dan toko kelontong memiliki kecenderungan mengambil aguan lebih rendah.

b. Mantan peserta LMPDP cenderung meningkat pendapatan dan tingkat kesejahteraannya berdasarkan umur dan jenis usaha. Umur mantan peserta LMPDP antara 45–55 tahun memiliki keuntungan yang lebih tinggi daripada tingkatan umur yang lain. Mantan peserta LMPDP yang memiliki usaha toko kelontong dan warung cenderung memiliki keuntungan dan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi daripada usaha lain, sedangkan usaha di bidang pertanian cenderung memiliki keuntungan dan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah daripada usaha yang lain.

3. Kecenderungan besar agunan tidak mempengaruhi keuntungan dan tingkat kesejahteraan mantan peserta LMPDP. Jumlah agunan dan keuntungan hanya dipengaruhi oleh jenis usaha yang ditekuni. Jenis usaha dipengaruhi oleh pendidikan terakhir.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Progam pensertipikata tanah secara masal dan menyeluruh hendaknya digalakan kembali. Karena selain memberikan kepastian hukum bagi para pemilik tanah, juga dapat terbukti mampu mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakatnya.
2. Hendaknya setalah pensertipikatan selesai BPN-RI memberikan *Access Reform* agar tujuan penyelenggaran pensertipikatan juga tercapai. Karena peningkatan kesejahteraan juga dipengaruhi faktor internal maupun eksternalnya.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi:

Adriana Baiduri, Rina. 2011. *Sertipikasi Hak Atas Tanah Guna Peningkatan Akses Permodalan Dalam Rangka Pemberdayaan masyarakat (studi di Desa Sukoharjo Kecamatan Nguglik dan Desa Harjobinangun Kecamatan Pakem, kabupaten Sleman)*. Yogyakarta : Skripsi STPN

Anonim. 2009. *Perandingan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta : Sinar Grafika.

Akyuwen, Roberto, *et al*. 2010. *teori dan praktek keuangan mikro di Indonesia*. Yogyakarta : Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada.

Ariyani Handoyo, Varida. 2007. *Pelaksanaan Ajudikasi Land Management And Policy Devolepment Program Di Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul*. Yogyakarta : Skripsi STPN

Gede Winarta, I. 2009. *Percepatan Sertipikasi Tanah Melalui Program Land Management And Policy Project (LMPDP) Di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi N.T.B. Tahun 2008 (Studi Kasus di Desa Kediri dan Desa Montang Are, Kecamatan Kediri).* Yogyakarta : Skripsi STPN

Harsono, Boedi. 2003. *Hukum Agraria Indonesia sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria isi dan pelaksanaannta*. Jakarta : Djambatan.

_____. 2008. *Hukum Agraria Indonesia himpunan peraturan- peraturan hukum tanah*. Jakarta : Djambatan.

Haryadi, Dedi, *et al*. 1998. *Tahap perkembangan usaha kecil dinamika dan peta potensi pertumbuhan*. Bandung : yayasan AKATIGA.

Maryam, Syarifah. 2008. *Analisis pendapatan dan efisiensi usaha tani aglaonema (aglaonema sp.) di Samarinda (Studi kasus pada usaha agrobisnis Salma Shofa Samarinda).* Samarinda : Program Studi Ekonomi Pertanian, Fakkultas Pertanian, Universitas Mulawarman

Nugroho, Aristiono, *et al*. 2013. *Resonansi Landreform lokal dinamika pengelolaan tanah di Desa Karanganyar*. Yogyakarta : STPN Press.

Soehendra, Djaka. 2010. *Sertifikat Tanah Dan Orang Miskin Pelaksanaan proyek ajudikasi di Kampung rawa Jakarta*. Jakarta : HuMa

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Menejemen*. Bandung : ALFABETA

Sujiyana. 2007. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Land Management And Policy Development Program Di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.* Yogyakarta : Skripsi STPN

Sumartiyah. 2009. *Studi Pelaksanaan Kegiatan Land Menegement And Policy Development Project (LMPDP) Di Desa Kaliagung, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo*. Yogyakarta : Skripsi STPN

Sumartono, Dedy. 2009. *Studi Pelaksanaan Land Menegement Di Kabupaten Bantul tahun 2005.* Yogyakarta : Skripsi STPN

Winoto, Joyo. 2008. *Tanah Untuk Rakyat Risalah Tentang Reforma Agraria Sebagai Agenda Bangsa.*

Website:

Tim liputan 6 SCTV. 2011. http://news.liputan6.com/read/341662/ekonom-ukuran-kemiskinan-menurut-bps-tidak-rasional diakses pada tanggal 2 Desember 2013

Tim student ipb. 2010. http://amaniaa08.student.ipb.ac.id/2010/06/20/indikator-kemiskinan-menurut-bkkbn/ diakses pada tanggal 2 Desember 2013

Ketut Suweca, I. 2012. http://sosok.kompasiana.com/2012/04/30/prof-sajogyo-dan-garis-kemiskinan-453836.html diakses pada tanggal 2 Desember 2013

Samsul. 2013. http://samsuljrs99.wordpress.com/2013/06/14/angka-kemiskinan-di-indonesia-menurut-bank-dunia/ diakses pada tanggal 2 Desember 2013

Elin.2008.http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=629 diakses pada tanggal 2 Desember 2013